

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN  
2009 TENTANG KEPARIWISATAAN DALAM  
PENGELOLAAN OBJEK WISATA TAO  
SILALAH DI DESA SILALAH  
KABUPATEN DAIRI**

**SKRIPSI**

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik**

**OLEH:  
ELMA MONITA MUNTHER  
198520140**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2023**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)29/9/23

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN  
2009 TENTANG KEPARIWISATAAN DALAM  
PENGELOLAAN OBJEK WISATA TAO  
SILALAH DI DESA SILALAH  
KABUPATEN DAIRI**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Di Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik  
Universitas Medan Area

**OLEH:**

**ELMA MONITA MUNTHE  
198520140**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 29/9/23

Access From (repository.uma.ac.id)29/9/23

### LEMBAR PENGESAHAN

NAMA : ELMA MONITA MUNTHE  
NPM : 198520140  
JUDUL : **Implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009  
Tentang Kepariwisataaan Dalam Pengelolaan Objek  
Wisata Tao Silalahi Di Desa Silalahi Kabupaten Dairi**

Disetujui oleh,

Pembimbing I

Pembimbing II



Agung Suharyanto, S.Sn, M.Si

Tanggal \_\_\_\_\_



Marlina Deliana, S.AB, M.AB

Tanggal \_\_\_\_\_

Mengetahui



Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si

Tanggal \_\_\_\_\_



Khairunnisah Lubis, S.Sos, M.I.Pol

Tanggal \_\_\_\_\_

Tanggal Lulus : 09 Agustus 2023

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)29/9/23

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elma Monita Munthe  
NPM : 198520140  
Tempat/Tanggal Lahir : Tongging, 28 Oktober 2000  
Alamat : Jl Tuasan Gg rukun, Medan  
Tembung

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Dalam Pengelolaan Objek Wisata Tao Silalahi Di Desa Silalahi Kabupaten Dairi” adalah hasil pelaksanaan penelitian saya dan seluruh ide, pendapat, dan materi dari sumber lain telah dikutip berdasarkan penulisan sumber referensi yang sesuai. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan jika pernyataan ini tidak sesuai dengan kenyataan yang saya urai diatas, maka saya bersedia menanggung sanksi yang akan dikenakan termasuk pencabutan gelar Sarjana Administrasi Publik yang nanti saya peroleh.

Medan, Maret 2023  
  
Elma Monita Munthe  
198520140



## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI


### TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS


Sebagai Civitas Akademik Universitas Medan Area, Saya yang Bertanda Tangan di Bawah ini:

Nama : Elma Monita Munthe  
NPM : 198520140  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Fakultas : Ilmu Sosial Politik  
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: “Implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Dalam Pengelolaan Objek Wisata Tao Silalahi Di Desa Silalahi Kabupaten Dairi” beserta perangkat yang ada ( Jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, Mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

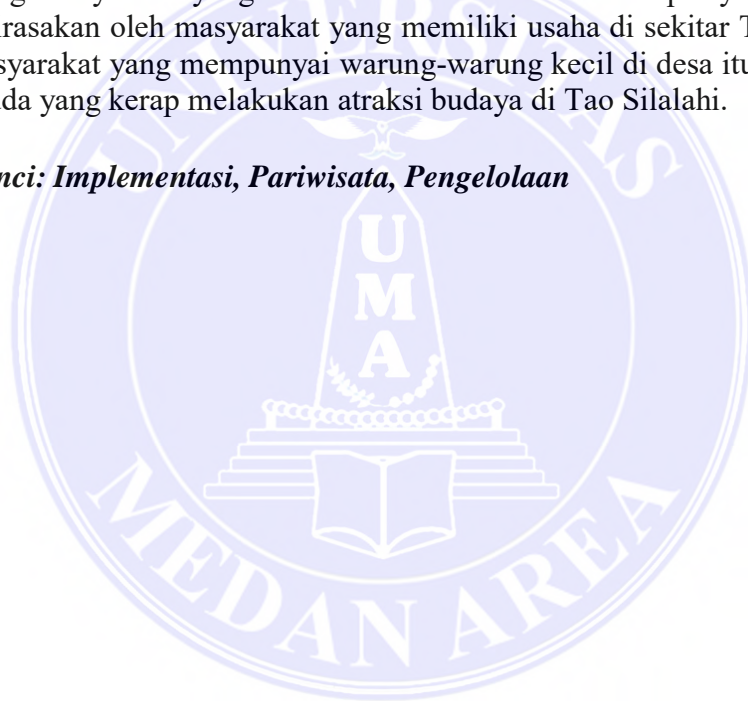
Medan, 21 Mei 2023  
  
Elma Monita Munthe  
198520140



## ABSTRAK

Desa Silalahi merupakan Desa yang terletak di Kabupaten Dairi, Kecamatan Silalahi Sabungan tepatnya di pinggir Danau Toba. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dalam Pengelolaan Objek Wisata Tao Silalahi dengan menggunakan teori George Edward III yang di pengaruhi oleh 4 variabel dalam implementasi yaitu Komunikasi, Sumber daya, Disposisi dan Struktur birokrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata di Objek Wisata Tao Silalahi belum terimplemetasi. Perekonomian masyarakat yang ada di Desa tersebut, khususnya yang mengelola objek wisata Tao Silalahi dapat dikatakan mengalami perubahan dan berdampak positif bagi masyarakat yang ada di Desa tersebut karena dampak yang terjadi bukan hanya dirasakan oleh masyarakat yang memiliki usaha di sekitar Tao Silalahi tapi juga masyarakat yang mempunyai warung-warung kecil di desa itu dan para anak-anak muda yang kerap melakukan atraksi budaya di Tao Silalahi.

***Kata kunci: Implementasi, Pariwisata, Pengelolaan***



## **ABSTRACT**

*Silalahi Village is a village located in Dairi Regency, Silalahi Rompin District, on the edge of Lake Toba. This study aims to determine the Implementation of Law Number 10 of 2009 concerning Tourism in the Management of Tourism of Tao Silalahi by using George Edward III's theory, influenced by 4 variables in policy implementation. The method used in this research is descriptive qualitative method and data collection techniques are Observations, Interviews and Documentation. The results of the study show that the Implementation of Law Number 10 of 2009 concerning Tourism at the Tao Silalahi Tourism Object has not been implemented.*

**Keywords: Implementation, Tourism, Management**



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi

Nama lengkap : Elma Monita Munthe

Tempat, Tanggal Lahir : Tongging, 28 Oktober 2000

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Kristen Protestan

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : JL Tuasan Gg Rukun, Medan Tembung

Status : Belum Menikah

Email : [elmamunthe@gmail.com](mailto:elmamunthe@gmail.com)

No. Handphone : 0813-6930- 7819

### Latar Belakang Pendidikan

2006 – 2012 : SDN 044854 Tongging

2012 – 2014 : SMP Karya Swasta Tongging

2014 – 2018 : SMA YP Yapim Taruna Merek

2019 – 2023 : S1 Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas

Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Medan Area



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, kesehatan, dan kasih karunia-Nya yang selalu berlimpah setiap waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan setiap tahapan dari penyusunan proposal yang berjudul **“Implementasi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Dalam Pengelolaan Objek Wisata Tao Silalahi Di Desa Silalahi Kabupaten Dairi”** yang disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi sarjana (S1) Di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Medan Area.

Perjalanan panjang telah penulis lalui dalam rangka menyelesaikan penulisan skripsi ini. Banyak hambatan yang dihadapi dalam penyusunannya, namun berkat kehendak-Nyalah penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, pada kesempatan ini patutlah kiranya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Ibu Dr. Effiati Juliana Hasibuan, Msi selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area
3. Ibu Khairunnisa Lubis, S.Sos, M.Ipol selaku ketua Program Studi Administrasi Publik
4. Bapak Agung Suharyanto, S.Sn., M.Si selaku dosen pembimbing I yang sudah berkenan meluangkan waktunya demi memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan skripsi.
5. Ibu Marlina Deliana, S.AB., M.AB, selaku dosen pembimbing II yang sudah

penyusunan skripsi

6. Bapak Hikmawan Syahputra, S.IP, MA selaku sekretaris skripsi saya yang sudah berkenan meluangkan waktu dalam seminar proposal, seminar hasil dan siding skripsi
7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area yang sudah berkenan memberikan pengetahuan yang sangatsangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
8. Segenap Tenaga Kependidikan Universitas Medan Area yang berkenan memberikan bantuan kepada penulis
9. Kedua Orangtua penulis Bapak T. Munthe dan Ibu E. Girsang yang paling berpengaruh dalam perjalanan penulis selama kuliah serta memberikan dukungan moril dan materil.
10. Yoel E.B Silalahi Selaku Pacar dari penulis yang senantiasa menemani dan memberikan dukungan serta semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh teman dekat penulis khususnya Bukan Warga +62 yang senantiasa memberi dukungan dan bersedia mendengarkan keluhan-keluhan selama proses penyusunan skripsi
12. Seluruh teman stambuk 2019 kelas Bilingual Prodi Administrasi Publik, yang telah berjuang bersama penulis dan memberi banyak pelajaran serta pengalaman berharga selama ini di Universitas Medan Area.
13. Bapak Rincon Situngkir Selaku Kepala Desa Silalahi III yang sudah memberikan ijin peneliti dan juga membantu kelancaran peneliti ini.
14. Seluruh Perangkat Desa Silalahi III yang sudah memberikan ijin untuk penelitian serta informasi yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

15. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang sudah membantu memberikan dukungan.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang penulis buat ini masih jauh dari sempurna hal ini karena terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan adanya saran dan masukan bahkan kritik membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembaca



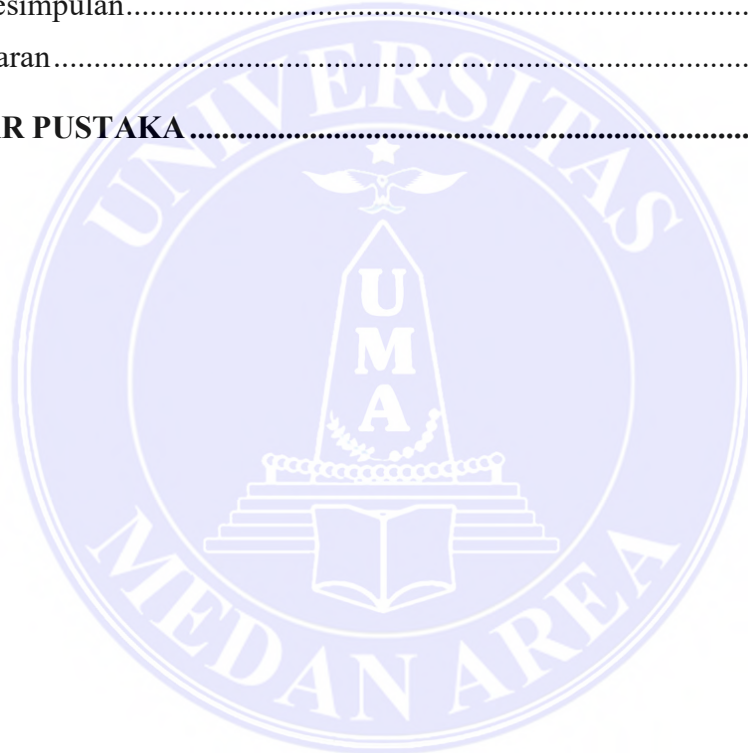
Medan, 13 Maret 2023

Elma Monita Munthe

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	
<b>ABSTRAK.....</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
2.1 Implementasi .....	9
2.1.1 Implementasi Menurut Para Ahli .....	9
2.2 Kepariwisataaan .....	12
2.3 Pengertian Objek Wisata .....	14
2.4 Penelitian Terdahulu.....	15
2.5 Kerangka Berpikir.....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	27
3.2 Sumber Data .....	28
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.4 Teknik Analisis Data .....	31
3.5 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	33
3.5.1 Lokasi Penelitian .....	33
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>35</b>
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian.....	35
4.4.1 Gambaran Dan Struktur Pemerintahan Desa Silalahi III .....	35
4.4.2 Visi Misi Pemerintahan Desa Silalahi III.....	36

4.4.3 Struktur Pemerintah Desa Silalahi III.....	38
4.2 Pulo Silalahi (Tao Silalahi) .....	41
4.3 Hasil Penelitian.....	43
4.4 Pembahasan Penelitian .....	44
4.4.1 Implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan Dalam Pengelolaan Objek Wisata Tao Silalahi .....	44
4.4.2 Faktor Penghambat Implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan Dalam Pengelolaan Objek Wisata Tao Silalahi.....	72
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
5.1 Kesimpulan.....	77
5.2 Saran.....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>



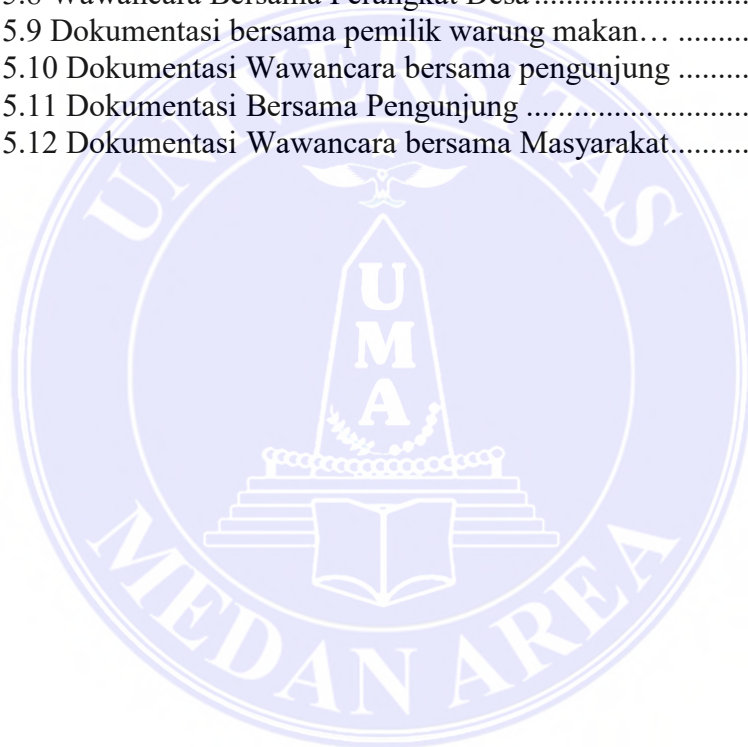
## DAFTAR TABEL

Tabel 2.2 Daftar objek wisata di kabupaten Dairi.....	5
Tabel 3.3 Nama-Nama Informan Penelitian.....	27
Tabel 3.4 Jadwal Penelitian.....	32
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk dan Luas Desa.....	36
Tabel 4.2 Nama-nama Pengelola Usaha .....	63



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Gambar Tao Silalahi.....	6
Gambar 2.1 Gambar Kerangka berpikir.....	15
Gambar 4.1 Kantor Kepala Desa Silalahi III.....	34
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Kantor Kepala Desa Silalahi III.....	36
Gambar 4.3 Gerbang Masuk Pulo Silalahi(Tao Silalahi).....	40
Gambar 4.4 Tao Silalahi.....	41
Gambar 5.6 Akses Jalan Menuju Tao Silalahi.....	89
Gambar 5.7 Dokumentasi Wawancara bersama perangkat Desa.....	90
Gambar 5.8 Wawancara Bersama Perangkat Desa.....	90
Gambar 5.9 Dokumentasi bersama pemilik warung makan... ..	91
Gambar 5.10 Dokumentasi Wawancara bersama pengunjung.....	91
Gambar 5.11 Dokumentasi Bersama Pengunjung.....	92
Gambar 5.12 Dokumentasi Wawancara bersama Masyarakat.....	93



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Panduan Wawancara.....	84
Lampiran II Surat Keterangan Penelitian .....	89
Lampiran III Hasil Dokumentasi.....	90





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia negara kepulauan terbesar di dunia yang sangat indah. Indonesia juga salah satu negara di dunia yang dikenal memiliki kekayaan alam dan beragam adat istiadat. Pariwisata di Indonesia sangatlah menarik dan beraneka ragam yang didukung oleh komponen keindahan alam dan kekayaan adat istiadat dari budaya setiap pulau. Disetiap pulau memiliki keunikan dan ciri khasnya masing masing. Indonesia mempunyai potensi besar untuk menjadi kawasan wisata dunia. Indonesia dianugerahi kekayaan alam yang luar biasa banyaknya, Indonesia juga memiliki beragam suku, budaya, ras, agama dan berbagai macam keindahan alam yang dapat dijumpai. Terlebih, Indonesia memiliki beragam sektor yang dapat mendongkrak devisa Negara (Rahma, 2020: 1-8)

Masyarakat Indonesia harus dapat memanfaatkan keadaan Indonesia yang kaya akan alam dan keanekaragaman budaya tersebut, untuk menarik perhatian wisatawan mancanegara maupun lokal. Selain pariwisata menjadi sumber devisa negara kegiatan wisata juga berperan dalam proses pembangunan dan pengembangan suatu wilayah. Contohnya saja adalah ketika pemerintah melihat sebuah objek wisata memiliki potensi yang besar untuk menarik perhatian khususnya wisatawan dari belahan dunia maka pemerintah akan mengambil kesempatan untuk menambah devisa negara. Yaitu dengan melakukan perbaikan infrastruktur seperti jalan dan fasilitas umum yang mendukung kegiatan objek wisata. Perbaikan itu tentunya selain untuk kegiatan wisata dapat juga untuk pengembangan dan pembangunan Nasional.

Provinsi Sumatera Utara yang menawarkan berbagai macam objek wisata baik objek wisata Alam maupun wisata budayanya. Sumatera Utara adalah salah satu provinsi terbesar di Indonesia, yang beribukotakan Medan dengan jumlah penduduk sekitar 58 jiwa. Sumatera Utara identik atau lebih dikenal dengan orang-orang Batak. Akan tetapi Sumatera Utara terdiri dari beberapa suku, yaitu suku Batak, Melayu dan Nias. Suku Batak sendiri terdiri dari beberapa sub suku, yaitu suku Batak Toba, suku Batak Simalungun, suku Batak Pakpak, suku Batak Mandailing, dan suku Batak Karo. Setiap suku dan sub suku tersebut memiliki ciri khasnya masing-masing, memiliki keunikannya masing-masing. Bahasa, budaya, adat istiadat dan kebiasaan yang berbeda-beda.

Jika membahas pariwisata di Sumatera Utara maka bayangan kita akan langsung tertuju dengan Danau Toba, yaitu danau terbesar dan terluas di Asia Tenggara. Danau hasil letusan gunung yang terjadi ribuan tahun silam. Danau yang di tengah-tengahnya terdapat sebuah pulau bernama Pulau Samosir. Danau yang dikelilingi beberapa kabupaten dan digunakan sebagai tempat mata pencaharian masyarakat sekitar untuk mencari nafkah sebagai nelayan. Keindahannya tidak perlu diragukan lagi, yang mana pengunjung akan disuguhkan dengan pemandangan yang mempesona dari berbagai sudut sekitar danau. Tidak hanya sekedar pemandangan terhadap dananya, tapi juga ditambah dengan pemandangan pegunungan yang hijau. Perjalanan sekali atau dua kali tidak akan membuat setiap pengunjung merasa bosan.

Pengunjung juga dapat merasakan dinginnya air danau Toba dengan mandi dan berenang di pantainya. Ada banyak tempat-tempat wisata yang bisa dikunjungi di setiap daerah yang ada di Sumut selain dari danau Toba, seperti

halnya Masjid Raya Medan di kota Medan, Muara di Tapanuli Utara, Sipinsur di Humbang Hasundutan, Air Terjun Sipiso-piso di Kabupaten Karo, Air Terjun Telaga Dwi Warna di Sibolangit, Cagar Alam Sibolangit, Bukit Gundaling, Fundland Mikie Holiday di Berastagi, Pantai Sorake dan Pantai Lagundri di Nias, Pulau Samosir, Pantai Air Tawar Bul-bul, Bukit Tarabunga, Air Terjun Sigur-gura di Tobasa, Perkebunan Teh Sidamanik dan itu pun masih beberapa dari sekian banyak tempat wisata di Sumut. Ada banyak tempat-tempat wisata yang bisa dijadikan sebagai destinasi berlibur bagi turis asing maupun turis lokal, baik tempat wisata yang sudah lama ada yang kian lama kian diperbaiki sampai tempat wisata yang baru. Selain berburu tempat wisata, di Sumut juga bisa belajar kebudayaannya yang melimpah.

Danau Toba salah satu danau terluas di Indonesia yang mana danau ini berada di Provinsi Sumatera Utara dan Danau Toba ini juga menjadi salah satu destinasi wisata di Provinsi Sumatera Utara yang banyak dikunjungi oleh para wisatawan. Perkembangan pariwisata di Sumatera Utara terus berlangsung dan tidak terlepas dari adanya berbagai faktor pendorong meliputi ketersediaan potensi prasarana objek wisata (jalan, instalasi pembangkit tenaga listrik, pelayanan kesehatan), sarana pokok (hotel, penginapan, jasa akomodasi lainnya, restoran atau warung, pemandu wisata dan sebagainya). Danau Toba dikelilingi oleh tujuh kabupaten yang berada di pinggiran Danau Toba dimana salah satunya adalah Kabupaten Dairi salah satu kabupaten yang ada di provinsi Sumatera Utara yang merupakan suatu wilayah yang memiliki potensi wisata yang sangat potensial dan dapat menunjang nilai wisata di provinsi Sumatera Utara.

Salah satu kecamatan di Kabupaten Dairi yang memiliki potensi wisata adalah Kecamatan Silahisabungan yang berlokasi di Desa Silalahi. Di kecamatan ini terdapat lokasi wisata air danau yakni pinggiran dari Danau Toba yang masyarakat lokal lebih dikenal dengan nama Tao Silalahi. Lokasi wisata Tao Silalahi memiliki potensi fisik yang cukup menarik, tampilan alam perbukitan yang masih asri dan hijau serta air danau yang belum ditumbuhi oleh enceng gondok dan jauh dari lokasi keramba nelayan lokal menjadikan lokasi banyak diminati dan dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun luar daerah. Gambaran kondisi fisik yang masih asri dan sejuk ini membuat lokasi Objek wisata Tao Silalahi sangat potensial untuk dikembangkan dan dijadikan sebagai sarana pembelajaran dan penelitian ilmiah.

Pengembangan objek wisata harus didukung oleh aspek dan potensi lain (*non fisik*), seperti aspek budaya setempat yang harus menerima wisatawan yang datang berkunjung dengan sikap ramah dan bersahabat serta ikut menjaga ketertiban serta kebersihan di lingkungan wisata, potensi non fisik berupa sarana rumah makan, kamar mandi/WC umum, lokasi parkir dan tempat sampah, serta prasarana seperti jaringan listrik, jalan, dan penyediaan air bersih. Berdasarkan pengamatan penulis, lokasi wisata tersebut memiliki nilai atau potensi wisata yang cukup tinggi dan dapat menjadi salah satu andalan sumber pendapatan asli daerah setempat, selayaknya pemerintah daerah setempat harus memberikan perhatian khusus untuk mengembangkan dan mengelolanya lebih baik.

**Tabel 1.1 Objek Wisata Di Kabupaten Dairi**

No	Lokasi	Nama Tempat Wisata
1	Sitinjo	Air Terjun Lae Pandaroh, Taman Wisata Iman
2	Sidikalang	Puncak Sidiangkat, Rumah Adat Pakpak, Gedung Nasional Djauli Manik
3	Desa Pancur Nuli	Danau Sicike-Cike
4	Desa Lau Renun	Lau Timah
5	Desa Silalahi	Tao Silalahi, Bukit Siadratas, Aek Sipaulak Hosa, Pantai Lala, Tugu Silalahi, Pantai Silalahi
6	Desa Mangan Molin	Sungai Lau Renun
7	Sempung Polling	Parhonasan
8	Desa Siempat Nempu Hulu	Letter Z
9	Desa Parongil	Air Terjun Lau Baski
10	Desa Bangun	Kolam Renang Cinandung Mbulan
11	Desa Paropo	Pulau Paropo

*Sumber: Olahan data dari Peneliti, 2022*

Tao Silalahi adalah destinasi wisata alam yang bisa di temui di sudut Danau Toba. Letaknya di Desa Silalahi, Kecamatan Silalahi Sabungan, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, lokasinya tidak begitu jauh dari Tongging dan Paropo. Keindahan Tao Silalahi yang air nya berasal dari danau toba, tidak berwarna hijau namun begitu jernih, namun keindahan tao silalahi agak terganggu oleh sampah yang berasal dari pengunjung. Dari tao silalahi terlihat bukit barisan yang indah, karena jarak diantaranya tidak terlalu jauh, banyak aktivitas yang bisa dilakukan di Tao Silalahi, misalnya berenang atau mengelilingi danau dengan menyewa perahu milik nelayan. Namun harus tetap waspada karena menurut masyarakat desa Silalahi, di bawah danau terdapat palung terdalam di Danau Toba yang kedalamannya mencapai lebih dari 900 meter, maka dari itu resiko tenggelam di Tao Silalahi masih sangat besar, karena pengamanan saat melakukan aktivitas renang di Tao Silalahi masih terbilang rendah.



**Gambar 1.1 Tao Silalahi, Kabupaten Dairi**  
(Sumber, [Viva.co.id/Anugrah andriansyah](http://Viva.co.id/Anugrah_andriansyah))

Tao Silalahi juga banyak diminati para anak muda untuk tempat menghabiskan waktu dengan cara *camping* santai, Karena disediakan sewa tenda oleh pengelola usaha yang ada disana bagi pengunjung yang ingin menginap di pinggir danau toba dengan cara *camping* santai, Tapi sebagai tempat untuk *camping* masyarakat kurang menarik, hal ini dikarenakan anak-anak muda yang *camping* kurang memiliki kesadaran, meski pendapatan masyarakat lebih besar., karena anak muda yang *camping* ke Tao Silalahi masih memiliki kesadaran yang minim akan kebersihan lingkungan, setelah melakukan *camping* mereka tidak membersihkan sampah yang mereka bawa, seperti sampah plastik kemasan mie instan dan botol minum kaleng.

Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan menyatakan bahwa kepariwisataan adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai

agama dan budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup serta kepentingan nasional. Pembangunan pariwisata juga diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional maupun global. Dari penjelasan latar belakang inilah, yang membuat penulis tertarik untuk meneliti objek wisata Tao Silalahi untuk mengetahui Implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Dalam Pengelolaan Objek Wisata Tao Silalahi Kabupaten Samosir.

## 1.2 Rumusan Masalah

Untuk memperjelas ruang lingkup yang akan diteliti, maka masalah yang akan diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Dalam Pengelolaan Objek Wisata Tao Silalahi Di Desa Silalahi Kabupaten Dairi?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat dari implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Dalam Pengelolaan Objek Wisata Tao Silalahi Di Desa Silalahi Kabupaten Dairi?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Dalam Pengelolaan Objek Wisata Tao Silalahi Di Desa Silalahi Kabupaten Dairi

2. Untuk mengetahui faktor penghambat dari implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata dalam Pengelolaan Objek Wisata Tao Silalhi Di Desa Silalahi Kabupaten Dairi

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini secara praktis, diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi kepada manajemen dan para masyarakat yang berkompeten sehingga dapat meningkatkan loyalitas pengunjung.

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam memperluas uraian teoritis dalam kebijakan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
2. Secara akademis, hasil penelitian ini mampu memperluas dan menambah wawasan dibidang Studi Implentasi Kebijakan dalam program pendidikan Administrasi Publik.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Implementasi**

Pendapat Cleaves yang dikutip dalam Wahab (2008: 187), yang secara tegas menyebutkan bahwa: Implementasi itu mencakup “Proses bergerak menuju tujuan kebijakan dengan cara langkah administratif dan politik”. Keberhasilan atau kegagalan implementasi sebagai demikian dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan atau mengoperasikan program-program yang telah dirancang sebelumnya.

##### **2.1.1 Implementasi Menurut Para Ahli**

Menurut Mazmanian dan Sebastiar dalam Wahab (2008: 68) Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2008: 65) Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. George C Edward III, Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan struktur birokrasi yang diambil dari buku yang berjudul Studi Implementasi Kebijakan Publik (Kasmad, 2013:74-80).

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa implentasi adalah suatu proses untuk menilai, mengevaluasi dan mengukur apakah suatu

akan dinilai apakah harus ada evaluasi atau tidak terhadap program tersebut.

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teori George C Edward III Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan struktur birokrasi yang diambil dari buku yang berjudul Studi Implementasi Kebijakan Publik (Kasmad, 2013:74-80), yaitu:

### 1. Komunikasi

Komunikasi adalah penyampaian pesan dari pemberi pesan (pembuat kebijakan) kepada penerima pesan (implementor kebijakan) melalui saluran dan tujuan tertentu, komunikasi juga disebut sebagai pertunjukan dan penafsiran pesan di antara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari organisasi tertentu, maka dari itu pelayanan/hospitality termasuk kedalam komunikasi karena pelayanan harus melakukan interaksi agar proses pelayanan berjalan seperti yang seharusnya (Kasmad, 2013: 74). Komunikasi juga sangat menentukan keberhasilan atas pencapaian tujuan dari sebuah implementasi. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan.

### 2. Sumber Daya

Kualitas sumber daya manusia merupakan unsur paling penting dalam melaksanakan kebijakan. Agar suatu kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik maka perlu didukung oleh sejumlah staf yang memiliki kompetensi, keahlian maupun keterampilan sesuai kebutuhan (Kasmad, 2013: 75). Meskipun suatu kebijakan telah dikomunikasikan dengan jelas dan konsisten, tetapi apabila dalam

pengimplementasiannya kekurangan sumber daya untuk melaksanakan dan menjalankan, maka implementasi tidak akan berjalan dengan efektif. Dalam sumber daya terbagi dari beberapa sumber daya seperti sumber daya manusia dan sumber daya alam.

### 3. Disposisi

Implementor yang memiliki komitmen dan jujur serta akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam kebijakan yang telah di susun. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam atas program yang telah digariskan dalam guide program. Komitmen dan kejujuran yang akan membawanya semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten. Sedangkan demokratis akan meningkatkan kesan baik inplementor kebijakan dihadapan anggota kelompok sasaran (Kasmad, 2013:79). Disposisi juga menyangkut persepsi, kewenangan, pemahaman dan komitmen para pelaksana (implementor) untuk menerapkan suatu kebijakan. Terdapat tiga kemungkinan sikap dari disposisi yaitu menerima, menolak atau bersikap netral.

### 4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi (*standard operating procedures*). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang begitu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks (Kasmad, 2013: 80).

## 2.2 Kepariwisataaan

Menurut Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, pariwisata didefinisikan sebagai berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan dalam Bab 1 Pasal 1 menyatakan bahwa pengusaha pariwisata adalah orang adalah orang atau sekelompok yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

Kepariwisataaan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha. Kepariwisataaan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kepariwisataaan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, dan bisa membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar sehingga perekonomian di daerah tersebut meningkat.

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan Bab 1 Pasal 1 dinyatakan bahwa wisata adalah: “Kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan

daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara”. Jadi, pengertian wisata megandung empat unsur, yaitu kegiatan perjalanan; dilakukan secara sukarela; bersifat sementara; perjalanan itu seluruhnya atau sebagian bertujuan untuk menikmati objek dan daya tarik wisata.

Menurut Ismayanti (2010:125-131) Wisata berdasarkan jenis-jenisnya dapat dibagi ke dalam dua kategori:

1. Wisata Alam, yang terdiri dari:
  - a Wisata pantai, merupakan kegiatan wisata yang ditunjang oleh sarana dan prasarana untuk berenang, memancing, menyelam, dan olahraga air lainnya, termasuk sarana dan prasarana akomodasi, makan dan minum.
  - b Wisata Etnik, merupakan perjalanan untuk mengamati perwujudan kebudayaan dan gaya hidup masyarakat yang dianggap menarik.
  - c Wisata Cagar Alam, merupakan wisata yang banyak dikaitkan dengan kegemaran akan keindahan alam, Kesegaran hawa di pegunungan,keajaiban hidup binatang (margasatwa) yang langka, serta tumbuh- tumbuhan yang jarang terdapat di tempat-tempat lain.
  - d Wisata Buru, merupakan wisata yang dilakukan di negeri-negeri yang memang memiliki daerah atau hutan tempat berburu yang dibenarkan oleh pemerintah dan digalakan oleh berbagai agen atau biro perjalanan.
  - e Wisata Agro, merupakan jenis wisata yang mengorganisasikan perjalanan ke proyek-proyek pertanian, perkebunan, dan ladang pembibitan di mana wisata rombongan dapat mengadakan kunjungan peninjauan untuk tujuan studi maupun menikmati segarnya tanaman di sekitarnya.

2. Wisata Sosial-Budaya, yang terdiri dari:
  - a Peninggalan sejarah kepurbakalaan dan monumen, wisata ini termasuk golongan budaya, monumen nasional, gedung bersejarah, kota, desa, bangunan-bangunan keagamaan, serta tempat-tempat bersejarah lainnya seperti bekas pertempuran yang merupakan daya tarik wisata utama di banyak negara.
  - b Museum dan fasilitas budaya lainnya, merupakan wisata yang berhubungan dengan aspek alam dan kebudayaan di suatu kawasan atau daerah tertentu. Museum dapat dikembangkan berdasarkan pada temanya, antara lain museum arkeologi, sejarah, entologi, sejarah alam, seni dan kerajinan, ilmu pengetahuan dan teknologi, industri, ataupun dengan tema khusus lainnya.

### 2.3 Pengertian Objek Wisata

Pengertian objek dan daya tarik wisata menurut undang-undang Nomor 9 Tahun 1990, yaitu Objek dan daya tarik wisata terdiri atas :

1. Objek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujud keadaan alam, serta flora dan fauna.
2. Objek dan daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud museum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, wisata agro, wisata tirta, wisata buru, wisata petualangan alam, taman rekreasi, dan tempat hiburan.

Sedangkan daya tarik wisata menurut undang-undang Nomor 10 tahun 2009 adalah segala sesuatu yang mempunyai keunikan, keindahan, dan nilai yang

berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Marpaung (2002:78) objek wisata adalah suatu bentukan atau aktivitas yang berhubungan, yang dapat menarik minat wisatawan atau pengunjung untuk dapat datang kesuatu tempat/daerah tertentu. Strategi Disbudparpora dalam pengembangan potensi objek wisata. Marpaung (2002: 78) menerangkan bahwa objek wisata adalah dasar bagi kepariwisataan. Tanpa adanya objek wisata disuatu daerah kepariwisataan sulit untuk dikembangkan. Objek daya tarik wisata sangat erat berhubungan dengan travel motivation atau travel fashion, karena wisatawan ingin mengunjungi serta mendapatkan suatu pengalaman tertentu dalam kunjungannya.

#### 2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan dasar dalam melakukan penelitian, sehingga memperkaya teori-teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian ini. Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti dapat ditunjukkan sebagai berikut:

1. Exgo (2018), Efektivitas Undang –Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Perusakan Daya Tarik Wisata Kabupaten Bangka” Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa undang-undang nomor 10 tahun 2009 belum efektif dalam penerapannya dilapangan, karena belum pernah terjadi penindakan terhadap kasus tindak pidana perusakan aset wisata. Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Persamaannya sama-sama membahas darimUndang-Undang

Nomor 10 Tahun 2009, Metode penelitian yang sama. Sedangkan perbedaannya yaitu di awalan judul, Perbedaan lokasi penelitian dan waktu penelitian.

2. Mutia Herlita Putri (2019), Implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pengembangan Kawasan Pariwisata Di Taman Nasional Way Kambas Lampung Hasil dari wawancara peneliti dengan berbagai pihak terkait dengan implementasi undang-undang No 10 Tahun 2009 tentang pengembangan kawasan pariwisata di Taman Nasional Way Kambas Lampung menghasilkan Implementasi Undang-undang No 10 Tahun 2009 pasal 11 sudah terlaksana cukup baik. Pimpinan dan para pegawai yang ada di Taman Nasional Way Kambas telah melakukan komunikasi yang baik dengan dinas pariwisata terkait dengan kerjasama pengembangan kawasan pariwisata yang ada di zona pemanfaatan Taman Nasional Way Kambas. Terdapat persamaan dan perbedaan antar penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Persamaannya terletak pada judul yang membahas tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 dan metode penelitian yang sama. Sedangkan perbedaannya yaitu pada lokasi penelitian dan waktu penelitian.
3. Riska (2020), Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Dalam Melakukan Promosi Destinasi Wisata Di Daerah Kabupaten Bone peneliti dapat memberikan kesimpulan terkait implementasi terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata mengenai kegiatan promosi dengan adanya dua unsur yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana. Terdapat



persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Persamaannya terletak pada judul yang sama membahas tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata dan Metode penelitian yang sama yaitu metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu lokasi penelitian dan waktu penelitian, Peneliti terdahulu melakukan penelitian di Kabupaten Bone pada tahun 2020 sedangkan penulis melakukan penelitian di Kabupaten Dairi 2022.

4. Muslim Aziz, SH, Aminoto, S.H., M.Si, (2014), Harmonisasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Dengan Praktik Perdagangan Internasional Di Bidang Jasa Pariwisata Di Indonesia Globalisasi/liberalisasi dengan segala aturannya memberikan kesempatan sekaligus juga tantangan pada saat yang bersamaan. Dan liberalisasi di sebuah Negara dimana kawasan agraris masih masif dan daerah pedalaman tersebar di mana-mana hal yang tidak mudah, terlebih lagi perdagangan jasa yakni bidang pariwisata. UU nomor 10Tahun 2009 hadir untuk merespon proses liberalisasi. Undang-undang yang sudah efektif berlaku dan menjadi landasan utama kepariwisataan semestinya mampu menghadirkan kedayagunaannya. Kekayaan alam negeri ini beserta potensi yang melekat seharusnya telah dirangkum dan ditransformasikan ke dalam undang-undang sehingga bisa menghadirkan kesejahteraan. UU Nomor 10 Tahun 2009 dihadapkan dengan ketentuan GATS yang merupakan bagian dari tiga kaki liberalisasi WTO, dua kaki lainnya adalah GATT dan TRIPS. Indonesia yang agraris akan dihadapkan pada

liberalisasi global. Oleh karenanya, UU yang sudah efektif berlaku mengatur kepariwisataan kita perlu diteliti bersama apakah telah ada harmonisasi dengan aturan global, yakni GATS. Ketentuan-ketentuan yang sesuai di antara kedua regulasi pun dapat ditemukan, di samping masih ada ketentuan yang kiranya masih bisa diperjuangkan melalui negosiasi lanjutan untuk keadilan bagi semua. Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Persamaannya terletak pada pembahasan yang sama-sama membahas tentang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Metode penelitian yang sama. Perbedaannya yaitu Lokasi penelitian dan waktu penelitian. Peneliti terdahulu membahas tentang Praktik Perdagangan Internasional Di Bidang Jasa Pariwisata Di Indonesia sedangkan penulis membahas tentang Pengelolaan Objek Wisata Tao Silalahi.

5. Fauiza Agnia (2018), Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Wisatawan Pada Kegiatan Wisata Tirta Terhadap Kerugian Yang Dialami Oleh Wisatawan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Hasil penelitian dari penulis bahwa perlindungan atas resiko kecelakaan pada kegiatan wisata tirta pada dasarnya telah diberikan pada Pasal 20 huruf f dan Pasal 26 huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata melalui kewajiban pengusaha pariwisata untuk memberikan asuransi kecelakaan bagi wisatawan pariwisata berisiko tinggi. Namun perlindungan terhadap kerugian wisatawan belum dijalankan secara optimal oleh pelaku usaha, masi terdapat pengusaha wisata tirta yang usahanya termasuk kegiatan

pariwisata berisiko tinggi tidak bekerjasama dengan perusahaan asuransi. Tindakan hukum yang dapat ditempuh oleh wisatawan yang mengalami kerugian pada kegiatan wisata tirta dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau penyelesaian sengketa melalui pengadilan yaitu pengajuan gugatan yang didasarkan oleh perbuatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Persamaannya yaitu membahas tentang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 dan metode penelitian yang sama, Sedangkan perbedaannya yaitu Lokasi penelitian, waktu penelitian dan peneliti terdahulu membahas tentang Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Wisatawan Pada Kegiatan Wisata Tirta Terhadap Kerugian Yang Dialami Oleh Wisatawan sedangkan penulis membahas tentang Pengelolaan Objek Wisata TaoSilalahi.

## 2.5 Kerangka Berpikir

Penelitian penulis yang berjudul Implementasi Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Dalam Pengelolaan Objek Wisata Pantai Pasir Putih Parbaba Kabupaten Samosir bertujuan untuk mengetahui sudah seberapa jauh implementasi undang undang nomor 10 tahun 2009 di objek wisata pantai pasir putih yang berpengaruh ke perekonomian sebagian besar masyarakat Huta Bolon. Implementasi undang undang nomor 10 tahun 2009 juga dapat dilihat dari seberapa besar partisipasi masyarakat dalam implementasi tersebut, Apakah implementasi undang undang nomor 10 tahun 2009 berjalan dengan baik dapat dilihat dari kualitas pelayanan masyarakat dalam mengelola objek wisata, dari perkembangan sektor pariwisata ini akan mendorong pembangunan wilayah maupun pembangunan nasional, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan kerja dan mengatasi kemiskinan di daerah wisata.

Isi dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Bab 1 Pasal 1:

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara (Rekreasi).
2. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata (Wisatawan).
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah (Fasilitas).

4. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha (Fasilitas).
5. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan (Atraksi Budaya)
6. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan (Destinasi pariwisata)
7. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata (Usaha wisata)
8. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata (Pengusaha pariwisata).
9. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata (Industri wisata).

10. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan (Kawasan/lokasi).
11. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja (Pelayanan/hospitality).
12. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan (Sertifikasi).
13. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pemerintah pusat).
14. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah (Pemerintah daerah).
15. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kepariwisataan (Menteri pariwisata).

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan teori George C Edward (Kasmad, 2013:74-80), Dan dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataa Sebagai berikut :

## 1. Komunikasi

Komunikasi adalah penyampaian pesan dari pemberi pesan (pembuat kebijakan) kepada penerima pesan (implementor kebijakan) melalui saluran dan tujuan tertentu, maka dari itu interaksi termasuk kedalam komunikasi. Komunikasi juga disebut sebagai pertunjukan dan penafsiran pesan di antara unit- unit komunikasi yang merupakan bagian dari organisasi tertentu, maka dari itu pelayanan/hospitality termasuk kedalam komunikasi karena pelayanan harus melakukan interaksi agar proses pelayanan berjalan seperti yang seharusnya.

## 2. Sumber Daya

Sumber daya manusia merupakan unsur paling penting dalam melaksanakan kebijakan. Ada 3 jenis sumber daya yaitu:

### a Sumber daya manusia

Menurut Hamali (2016:2) menyatakan bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang terdapat dalam organisasi, meliputi semua orang yang melakukan aktivitas. Maka dari itu rekreasi, wisatawan dan atraksi budaya termasuk kedalam sumber daya manusia.

## b Sumber daya alam

Sumber daya alam merupakan salah satu modal pembangunan dan selama lebih dari empat dasawarsa telah menjadi mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sumber daya alam juga merupakan barang ekonomi khusus (*economic goods*) karena berbeda dengan modal buatan, sumber daya alam tidak dihasilkan oleh manusia, sehingga sering disebut sebagai anugrah alam (Fauzi 2014:1). Maka dari itu destinasi pariwisata dan kawasan/lokasi masuk kedalam sumber daya alam.

## 3. Fasilitas

Menurut Zakiah Daradjat (2012: 230) Fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat mempermudah upaya dan memperlancar kerja dalam rangka mencapai suatu tujuan. Maka dari itu Fasilitas sangat dibutuhkan agar sumber daya manusia dan sumber daya alam dapat berjalan dengan baik, khususnya dalam suatu objekwisata.

## 3. Disposisi

Sikap para implementor merupakan salah satu faktor penting terhadap keberhasilan kebijakan tersebut. Kalau mereka berpandangan positif terhadap kebijakan itu, maka kemungkinan besar kebijakan itu berhasil, demikian pula sebaliknya. Maka dari itu Wisatawan termasuk kedalam Disposisi

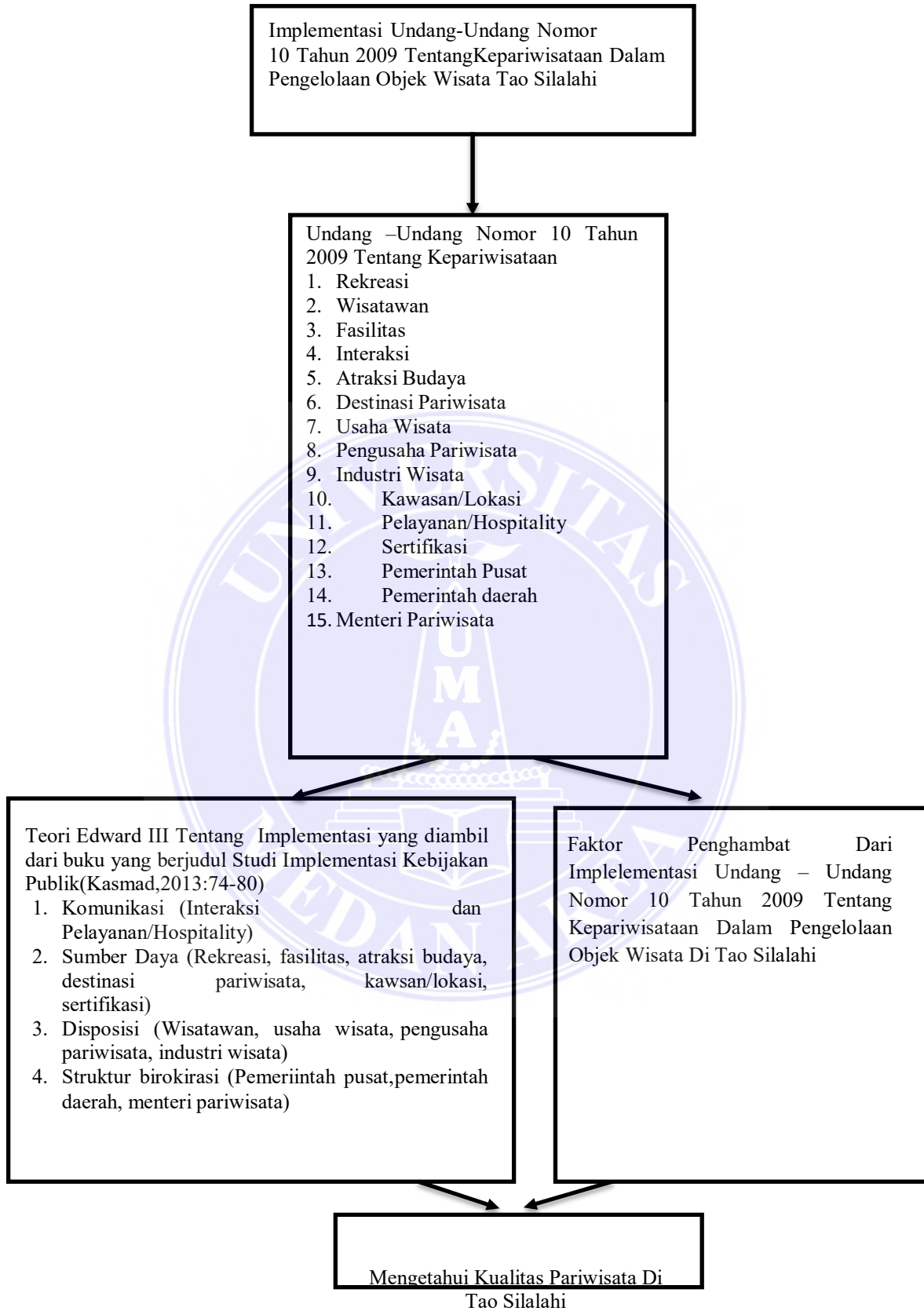
Disposisi juga menyangkut persepsi, kewenangan, pemahaman dan komitmen para pelaksana (implementor) untuk menerapkan suatu kebijakan. Terdapat tiga kemungkinan sikap dari disposisi yaitu menerima, menolak atau bersikap netral. Agar implementasi kebijakan dapat efektif, maka segenap upaya



harus dilakukan oleh pembuat kebijakan agar isi dan tujuan kebijakan dapat berkesesuaian dengan keinginan para implementor melalui pemahaman setiap individu akan arah kebijakan yang mereka kerjakan/implementasikan. Maka dari itu Usaha wisata, pengusaha pariwisata dan industri wisata masuk kedalam Disposisi.

#### 4. Struktur Birokrasi

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan adalah struktur birokrasi. Salah satu kelemahan birokrasi saat ini yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan adalah ia terlalu dibatasi oleh struktur dan prosedur-prosedur. Terdapat dua hal penting dalam struktur organisasi yaitu: Pertama, prosedur-prosedur dan ukuran dasar kerja atau Standard Operating Procedures (SOP) yang berasal dari dalam (internal) organisasi. SOP berisi standar-standar baku dalam melaksanakan suatu pekerjaan, yang cocok untuk organisasi yang relatif tidak menghadapi perubahan drastis, namun akan sulit menyesuaikan diri terhadap organisasi yang menghendaki perubahan cara- cara yang lazim dilakukan. Maka dari itu Pemerintah pusat, Pemerintah daerah dan Menteri masuk kedalam struktur birokrasi, karena merekalah yang paling berpengaruh dalam membuat suatu kebijakan.



**Bagan 2.2 Gambar Kerangka berpikir**  
(Oleh Peneliti, 2022)

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah Deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan terhadap variable mandiri yaitu tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variable yang lain (Silitonga, 2011:10). Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi didapat setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian. Berdasarkan analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum yang sifatnya abstrak tentang kenyataan-kenyataan yang mempengaruhi Implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Dalam Pengelolaan Objek Wisata Tao Silalahi Kabupaten Dairi.

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Creswell (2016:19) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu dan kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prodeur mengumpulkan data yang spesifik, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum, dan menafsirkan makna data.

### 3.2 Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian terkait. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2013:193) Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah hasil wawancara yang peneliti peroleh dari Kepala Desa yang ada di Desa Silalahi, Pengelola Objek Wisata Tao Silalahi, Masyarakat Desa Silalahi, dan Pengunjung yang berkunjung ke Tao Silalahi.

#### 2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2018: 456) data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah sesuai buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan topik penelitian mengenai sistem pengendalian internal atas sistem dan prosedur penggajian dalam usaha mendukung efisiensi biaya tenaga kerja. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah media dan artikel yang berkaitan dengan Objek Wisata Tao Silalahi.

#### 3. Informan Penelitian

Informan adalah seseorang yang diasumsikan mempunyai informasi penting tentang suatu objek. Orang yang dianggap memiliki banyak pengetahuan tentang

masalah yang diteliti disebut informan penelitian. Informan tersebut kemudian dipilih sebagai subjek penelitian setelah lokasi penelitian dipilih. Moleong (2008:27) menyatakan: Dalam suatu penelitian dapat digunakan metode pemilihan informan secara *purposive*, dimana diasumsikan bahwa informan mampu memberikan informasi yang diinginkan sesuai dengan masalah penelitian. Berikut informan atau nara sumber yang diperlukan untuk penelitian yang akan dilakukan di Tao Silalahi Kabupaten Dairi ini agar diperoleh data yang lebih tepat dan lebih mendalam:

1. Informan inti adalah individu berpengetahuan yang mampu menjelaskan berbagai topik terkait penelitian dan tidak terbatas pada warga, tokoh masyarakat, atau akademisi (Sugiyono, 2019: 25)
2. Informan utama (Sugiyono, 2019: 25) Informan utama adalah orang yang mengetahui masalah penelitian secara mendalam dan teknis.
3. Informan tambahan adalah siapa saja di wilayah penelitian yang dianggap memiliki informasi tentang masalah yang diteliti (Sugiyono, 2019:25)

**Tabel 3.3 Nama- Nama Informan Penelitian**

No	Nama Informan	Jenis Informan	Keterangan
1	Ibu Martha Sirait, Bapak KastonSitungkir, Ibu Rista Sidabariba, Bapak M. Simarmata	Informan Utama	Pengelola Usaha dan Masyarakat
2	Seluruh Perangkat Desa Silalahi III	Informan Inti	Perangkat Desa SilalahiIII
3	Saudara Dian Siregar dan Saudari Dora K Munthe	Informan Tambahan	Pengunjung

*Sumber oleh peneliti, 2022*

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2010: 62) pengumpulan data dilakukan pada kondisi alamiah yaitu penelitian pada kondisi sosial dalam konteks yang sesungguhnya, sehingga untuk mengumpulkan data pada kondisi alamiah tersebut dibutuhkan teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

#### 1. Observasi

Menurut Sugiyono (2013: 203) observasi merupakan suatu proses kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Teknik observasi melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala yang tampak pada objek penelitian. Menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono observasi merupakan suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis tetapi yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan terhadap pengelolaan objek wisata Tao Silalahi Kabupaten Dairi.

#### 2. Wawancara

Menurut Sugiyono (2013: 194) Wawancara adalah Pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara diartikan juga sebagai kegiatan untuk mencari informasi yang akurat melalui komunikasi dua arah antara peneliti dengan narasumber yang menjadi objek dalam sebuah penelitian. Wawancara dapat dilakukan dengan menggunakan panduan

wawancara ataupun dialog secara langsung. Wawancara akan dilakukan dengan Informan yang mengetahui tentang pengelolaan dan perkembangan objek wisata Tao Silalahi Kabupaten Dairi adalah Bapak Rincon Situngkir selaku kepala Desa Silalahi III Beserta dengan Perangkat Desa Silalahi III, Ibu Martha Sirait, Ibu Rista Sidabariba, Bapak Kaston Situngkir selaku Pengelola Usaha dan Saudara Dian Siregar dan Dora K Munthe selaku Pengunjung.

### 3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2013: 205) bahwa studi dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi juga dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku terkait program stunting maupun dokumen seperti peraturan perundang-undangan untuk memperoleh data yang nantinya akan diolah sehingga tidak berdasarkan perkiraan tetapi sudah tersedia didalam buku maupun dokumen yang sudah ada. Dokumentasi juga dapat dilakukan dengan pengambilan foto. Dokumentasi akan dilakukan di Objek Wisata Tao Silalahi di Desa Silalahi Kabupaten Dairi dengan mengambil foto yang berkaitan dengan penelitian.

### 3.4 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2013: 207) pengertian analisis data adalah kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul, kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2018: 246) analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data

dalam periode tertentu. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Miles dan Huberman menawarkan pola umum analisis dengan mengikuti model interaktif sebagai berikut:

### 1. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2018: 247-249) Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yang sesuai dengan topik penelitian, mencari tema dan polanya, pada akhirnya memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam mereduksi data akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai dan telah ditentukan sebelumnya. Reduksi data juga merupakan suatu proses berfikir kritis yang memerlukan kecerdasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sudah seberapa jauh implementasi Undang Undang pariwisata dalam mengembangkan Objek Wisata Tao Silalahi di Desa Kabupaten Dairi. Maka peneliti akan mengelola informasi yang didapatkan dari berbagai informan baik itu pemerintah ataupun masyarakat. Dari hasil pemilihan info tersebut maka peneliti akan menggolongkan info mana yang perlu dan tidak perlu.

### 2. Penyajian Data

Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk table, grafik, flowchart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data dapat terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan,



sehingga akan mudah dipahami. Selain itu dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya namun yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, dan tersusun sehingga akan semakin mudah dipahami (Sugiyono, 2018: 249).

### 3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah terakhir dalam menganalisis penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Menurut Sugiyono (2018: 252-253) kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan perumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Penarikan kesimpulan akan dilakukan setelah penulis melakukan penelitian yang berjudul Implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Dalam Pengelolaan Objek Wisata Tao Silalahi Kabupaten Dairi.

## 3.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

### 3.5.1 Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di Desa Silalahi, Kecamatan Silalahisabungan, Kabupaten Dairi, tepatnya di Tao Silalahi untuk

memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan. Peneliti memilih Desa Silalahi, Kecamatan Silalahisabungan, Kabupaten Dairi karena ingin melihat bagaimana implementasi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 dalam pengelolaan objek wisata Tao Silalahi.

**Tabel 3.3 Jadwal Penelitian**

No	Uraian	Sept 2022	Okt 2022	Nov 2022	Des 2022	Jan 2023	Feb 2023	Mar 2023
1	Pengajuan judul							
2	Bimbingan proposal							
3	Seminar proposal							
4	Penelitian							
5	Seminar Hasil							
6	Perbaikan skripsi							
7	Sidang							

*oleh peneliti, 2022*

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Dalam Pengelolaan Objek Wisata Tao Silalahi Di Desa Silalahi Kabupaten Dairi, belum terimplementasi dengan baik, walaupun beberapa sudah memenuhi standar dalam pengelolaan objek wisata yang sesuai. Dengan menggunakan Teori Edward III Tentang Implementasi (Kasmad, 2013:74-80), yaitu: Komunikasi (Interaksi dan Pelayanan/Hospitality); Sumber Daya (Rekreasi, fasilitas, atraksi budaya, destinasi pariwisata, kawasan/lokasi, sertifikasi); Disposisi (Wisatawan, usaha wisata, pengusaha pariwisata, industri wisata); Struktur birokrasi (Pemerintah pusat, pemerintah daerah, menteri pariwisata):
  - a) Komunikasi yang ada di objek wisata belum maksimal walaupun antara pemerintah daerah dan masyarakat yang mengelola usaha di kawasan Tao Silalahi sudah berjalan dengan baik tetapi belum pernah diadakan sosialisasi tentang kepariwisataan pada objek wisata tersebut, dan dari pelayanan yang dilakukan oleh masyarakat yang mengelola usaha di objek wisata Tao Silalahi membuat pengunjung nyaman dan suka jika berkunjung ke objek wisata tersebut tetapi pada pelayanan terkait dalam penunjuk arah jalan menuju objek wisata Tao Silalahi masih belum maksimal karena masih ada yang dibuat menggunakan tulisan tangan.
  - b) Sumber daya, Objek wisata Tao Silalahi sangat cocok menjadi sebuah destinasi wisata dan para wisatawan sangat nyaman jika berkunjung ke objek wisata Tao Silalahi karena kawasan wisata yang sangat strategis dan

lingkungan yang masih terjaga dengan pemandangan yang murni dihasilkan oleh alam. Bahkan dalam Sumber daya manusia nya pun mengutamakan kenyamanan para wisatawan sehingga mendapat nilai positif dari wisatawan yang berkunjung ke objek wisata tersebut,

- c) Disposisi, sikap para pengelola usaha di Tao Silalahi sangat ramah selalu mengutamakan kebersihan lingkungan wisata agar pengunjung nyaman dan senang berwisata ke tempat tersebut maka dari itu Perekonomian masyarakat yang ada di Desa tersebut, khususnya yang mengelola objek wisata Tao Silalahi dapat dikatakan mengalami perubahan dan berdampak positif bagi masyarakat yang ada di Desa tersebut. karena dampak yang terjadi bukan hanya dirasakan oleh masyarakat yang memiliki usaha di sekitar Tao Silalahi tapi juga masyarakat yang mempunyai warung-warung kecil di desa itu dan para anak-anak muda yang kerap melakukan atraksi budaya di Tao Silalahi.
- d) Struktur Birokrasi, dalam mengelola sebuah objek wisata sangat diperlukan adanya peraturan daerah maupun pusat, agar tata kelola sebuah objek wisata tertata dengan rapih dan memnuhi standard pengelolaan pariwisata, dalam objek wisata Tao Silalahi hal tersebut belum diadakan, belum ada peraturan dari daerah maupun pusat dalam pengelolaan objek wisata tersebut.

2. Faktor Penghambat Implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan Dalam Pengelolaan Objek Wisata Tao Silalahi yaitu:

- a) Fasilitas untuk melakukan aktivitas renang maupun bermain di air yang masih kurang memadai bahkan tidak ada sama sekali, sebagai objek wisata yang berada di pinggir danau, fasilitas tersebut merupakan hal yang penting, yang mana Tao silalahi objek wisata yang menjual keindahan alamnya melalui danau, namun justru fasilitas untuk aktivitas di danau yang masih minim di objek wisata Tao Silalahi. Fasilitas di Tao Sillahi masih belum maksimal, meskipun beberapa fasilitas sudah memadai, namun untuk fasilitas yang sangat penting masih belum memadai di Tao Silalahi, terlebih lagi Tao Silalahi yang terkenal karna Danau nya tapi malah fasilitas untuk aktivitas di Danau yang masih belum memadai, hal ini dapat menjadi faktor penghambat untuk memenuhi Implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 karena fasilitas merupakan bagian penting dari suatu Objek Wisata.
- b) Belum adanya Undang-Undang khusus dari Pemerintah pusat dan Daerah untuk mengelola objek wisata Tao Silalahi juga Belum ada sehingga Implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan dalam Pengelolaan Objek Wisata Tao Silalahi belum sepenuhnya terimplementasi.

## 5.2 Saran

Adapun saran yang akan penulis berikan dalam pengelolaan objek wisata Tao Silalahi sebagai berikut:

1. Mengadakan sosialisasi sadar wisata kepada para pengelola objek wisata Tao silalahi guna untuk lebih memajukan objek wisata Tao Silalahi.
2. Agar lebih melengkapi fasilitas yang memadai dalam melakukan aktivitas dalam Air, guna meningkatkan keamanan objek wisata Tao Silalahi, Menambah wahana bermain di Air agar lebih menarik perhatian para wisatawan.
3. Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah perlu membuat peraturan khusus dalam pengelolaan objek wisata Tao Silalahi, hal ini dapat juga meningkatkan kualitas objek wisata dan juga dapat lebih memajukan objek wisata Tao Silalahi.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Abdul Wahab, Solichin (2021) *Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*, Jakarta: PT. Bumi Aksara

\_\_\_\_\_, (2008) *Analisis Kebijakan dari formula ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Pt. Bumi Aksara.

Creswell, John W. (2016) *Research design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Edisi Keempat (Cetakan Kesatu). Yogyakarta: Pusat Pelajar

Fauzi, Akhmad. (2014). *Valuasi Ekonomi dan Penilaian Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. Bogor: IPB.

Kasmad, Rulinawaty. (2013) *Studi Implementasi Kebijakan Publik*, Makassar: Kedai Aksara

Moleong, Lexy J. (2008) *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*. Sulawesi Selatan: Sekolah Tinggi Theologia jaffray

Noor, Juliansyah. (2017) *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri

Silitonga, P.M. (2011). *Statistika: Teori dan Aplikasi dalam Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu

Sugiyono. (2013) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

\_\_\_\_\_, (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.

\_\_\_\_\_, (2019) *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Yusuf, Muri A. (2017) *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.

Zakiah, Daradjat., (2012) *Fasilitas Transportasi Konsumen*. CV Alfabeta: Bandung.

## Jurnal dan Skripsi

- Agusta, Ivanovich. (2003). Teknik pengumpulan dan analisis data kualitatif. *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor* 27(10)
- Ali, Baginda Syah. (2015) *Strategi Pengembangan Fasilitas Guna Meningkatkan Daya Tarik Minat Wisatawan Di Darajat Pass (Waterpark) Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut*. Diss. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Berry, Michael Frans. (2021) Pembentukan Teori Peraturan Perundang-Undangan." *Muhammadiyah Law Review* 2(2), 87-91.
- Fauzia, Agnia. (2018) *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Wisatawan Pada Kegiatan Wisata Tirta Terhadap Kerugian Yang Dialami Oleh Wisatawan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan*. Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Jaya, I. Wayan Paramarta, dan I. Gede Putra Ariana. (2014) *Peran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan Dalam Perlindungan Dan Pelestarian Objek Wisata*. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*.
- Kalangi, Pingkan, Tampi Budi Gustaaf, dan Londa Yohanis Very. (2017) Implementasi Kebijakan Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada Camat di Kantor Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa." *JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK* 3(46).
- Murti, Cipto, and Holi Bina Wijaya. (2013), Pengaruh kegiatan komersial Malioboro terhadap fungsi bangunan bersejarah di koridor jalan Yogyakarta. *Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota)* 2(1), 60-75.
- Muslim Aziz, (2020) *Harmonisasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan Dengan Praktik Perdagangan Internasional Di Bidang Jasa Pariwisata Di Indonesia*. Diss. Universitas Gadjah Mada.
- Prasetyo, Putro. (2013) Strategi Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga dalam Pengembangan Potensi Objek Wisata Kota Tarakan. *E-Journal Ilmu Pemerintahan* 1(1), 151-164.
- Putri, Herlita Mutia. (2019) *Implementasi Undang-Undang No 10 Tahun 2009 Tentang Pengembangan Kawasan Pariwisata Di Taman Nasional Way Kambas Lampung* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Rahma, Adenisa Aulia. (2018) "Potensi Sumber Daya Alam dalam Mengembangkan Sektor Pariwisata di Indonesia. *Jurnal Nasional Pariwisata* 12(1), 1-8



Riska. (2020) *Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Dalam Melakukan Promosi Destinasi Wisata Di Daerah Kabupaten Bone.*

Sihaloho, Relizan. (2017) *Perkembangan Pantai Pasir Putih Parbaba Sebagai Objek Wisata Di Danau Toba Kabupaten Samosir (2006-2017)* (Doctoral dissertation, UNIMED).

Yani, Ahmad. (2018) Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12(2), 119.

## Artikel

Hayati, Rina (2022), *Pengertian Teknik Analisis Data, Jenis, Cara Menulis, dan Contohnya*, penelitian.ilmiah.com, <https://penelitianilmiah.com/teknik-analisis-data/>.

Juraidi (2021), *Tao Silalahi di Danau Toba, objek wisata andalan Kabupaten Dairi*, lampung.antaranews.com, <https://lampung.antaranews.com/berita/482520/tao-silalahi-di-danau-toba-objek-wisata-andalan-kabupaten-dairi>

Sendari, Anugrah Ayu (2021), *Objek adalah Bagian dari Struktur Kalimat, Kenali Penggunaannya*, hot.liputan6.com, <https://hot.liputan6.com/read/4692952/objek-adalah-bagian-dari-struktur-kalimat-kenali-penggunaannya>

Wahyudi, Nova (2021), *Memandangi Danau Toba Dari Tao Silalahi*, cnnindonesia.com, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20210225121337-269-610742/memandangi-danau-toba-dari-tao-silalahi>

## UNDANG – UNDANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang  
Kepariwisata

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran I Panduan Wawancara

#### Implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Dalam Pengelolaan Objek Wisata Tao Silalahi di Desa Silalahi Kabupaten Dairi

#### Identitas Informan Inti

Nama : Seluruh Perangkat Desa Sillaahi III

Jabatan : Perangkat Desa

Tanggal Wawancara : 09 Februari 2023

Tempat/waktu : Kantor kepala Desa Silalahi III

#### Pedoman Wawancara kepada Informan Inti

##### 1. Komunikasi

- 1) Apakah komunikasi antara Pengelola Usaha dan Perangkat Desa dalam memberdayakan wisata Tao Silalahi berjalan dengan Lancar?
- 2) Apakah Perangkat Desa pernah melakukan sosialisasi sadar wisata kepada masyarakat yang mengelola Objek wisata Tao Silalahi?
- 3) Bagaimana hubungan antara perangkat Desa dan Masyarakat dalam pemberdayaan objek wisata Tao Silalahi?
- 4) Apakah Perangkat Desa mempunyai visi misi yang sama dengan masyarakat untuk memajukan Objek wisata Tao Silalahi?
- 5) Bagaimana hubungan antara perangkat Desa dan Masyarakat dalam pemberdayaan objek wisata Tao Silalahi?

##### 2. Sumber daya

- 1) Bagaimana upaya yang dilakukan perangkat desa Parbaba dalam menjaga kebersihan objek wisata Tao Silalahi?
- 2) Bagaimana Tingkat perekonomian masyarakat di desa ini sesudah adanya objek wisata yang sekarang?

- 3) Apakah masyarakat sekitar ikut serta dalam menjaga kebersihan Tao Silalahi?
- 4) Menurut bapak bagaimana potensi Tao Silalahi, apakah layak menjadi destinasi wisata?
- 5) Bagaimana kualitas Sarana dan Prasarna wisata Tao Silalahi?

### **3. Disposisi**

- 1) Adakah kerjasama antara Dinas Pariwisata dengan masyarakat atau lembaga-lembaga lain dalam mendorong kemajuan objek wisata Tao Silalahi?
- 2) Menurut bapak apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan dari wisata ini?

### **4. Struktur birokrasi**

- 1) Adakah Peraturan khusus atau Undang-Undang khusus yang dibuat oleh pemerintah pusat dalam pengelolaan wisata di Desa ini, khususnya Tao Silalahi?
- 2) Adakah Pengelola usaha yang tidak mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh perangkat Desa terkait dalam wisata Tao Silalahi?
- 3) Bagaimana Perangkat Desa menyikapi jika ada pengelola usaha yang tidak mengikuti aturan yang sudah diterapkan dalam Pengelolaan wisata Tao Silalahi?

## II. Identitas Informan Utama

Nama : Bapak K. Situngkir/Ibu M. Sirait/Ibu R. Sidabariba

Jabatan : Pengelola usaha/Pemilik warung

Tanggal Wawancara : 10 Februari 2023

Tempat/waktu : Objek wisata Tao Silalahi

## 2. Pedoman wawancara kepada Informan Utama

### 1. Komunikasi

- 1) Apakah komunikasi antara perangkat desa dan pengusaha dalam memberdayakan objek wisata Tao Silalahi berjalan dengan baik?
- 2) Adakah sosialisasi sadar wisata yang dilakukan oleh perangkat Desa kepada para pengelola usaha di wisata Tao Silalahi?
- 3) Apakah sesama pengelola usaha di Tao Silalahi sepakat dalam membuat harga jualan?
- 4) Apakah sesama pengelola usaha di Tao Silalahi berpartisipasi dalam menjaga kebersihan Pantai?
- 5) Bagaimana cara pengelolaan pelayanan yang dilakukan oleh para pengelola usaha yang ada di Tao Silalahi?

### 2. Sumber daya

- 1) Bagaimana kualitas sarana dan prasarana yang ada di Tao Silalahi?
- 2) Adakah campur tangan dari pemerintah untuk melengkapi fasilitas Renang Tao Silalahi?
- 3) Bagaimana cara pengelola usaha dalam menjaga kebersihan dan kelestarian objek wisata?
- 4) Pernahkah diadakan atraksi budaya di objek wisata Tao Silalahi?
- 5) Apakah dengan adanya objek wisata ini berpengaruh kepada perekonomian masyarakat?

### 3. Disposisi

- 1) Apakah sesama pengelola usaha di objek wisata Tao Silalahi mempunyai aturan yang sama dalam mengelola objek wisata ini?
- 2) Jika sama, Peraturan seperti apa yang harus di taati pengunjung jika berkunjung ke objek Tao Silalahi?
- 3) Jika tidak sama, Apakah perangkat desa tidak membuat peraturan khusus kepada pengunjung jika berkunjung ke objek wisata Tao Silalahi?
- 4) Adakah aturan khusus yang dibuat oleh pengelola usaha yang harus di patuhi pengunjung bila berkunjung ke Tao Silalahi?
- 5) Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu jika ada wisatawan yang tidak menaati aturan yang sudah dibuat?
- 6) Adakah keamanan khusus yang dilakukan oleh pihak pengelola usaha untuk menjamin keselamatan pengunjung yang berenang di Tao Silalahi?
- 7) Bagaimana tanggapan masyarakat dengan adanya pengaruh yang ditimbulkan oleh objek wisata Tao Silalahi?

### 4. Struktur Birokrasi

Adakah Undang-undang khusus yang dibuat oleh pemerintah daerah tentang objek wisata tao Silalahi?

## **Identitas Informan Tambahan**

Nama : Bapak M.Simarmata Dian Siregar/Dora K. Munthe  
Jabatan : Masyarakat/Pengunjung  
Tanggal Wawancara : 10-11 Februari 2023  
Tempat/waktu : Desa Silalahi III dan Tao Silalahi

## **Pedoman wawancara kepada Informan Tambahan (Pengunjung)**

### **1. Komunikasi**

- 1) Bagaimana komunikasi antara pengunjung dengan pengelola usaha yang ada di objek wisata ini?
- 2) Apakah ada hal yang membuat pengunjung bersusah payah berkomunikasi dengan pengelola usaha?
- 3) Bagaimana tanggapan pengunjung terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh pengelola Tao Silalahi?

### **2. Sumber daya**

- 1) Menurut pengunjung apakah fasilitas yang ada di Tao Silalahi sudah sesuai dengan yang seharusnya?
- 2) Menurut pengunjung apakah harga jualan yang ditawarkan oleh penjual sesuai dengan yang seharusnya?
- 3) Bagaimana tanggapan pengunjung tentang kebersihan lingkungan objek wisata Tao Silalahi?

### **3. Disposisi**

- 1) Apakah pengunjung nyaman dengan peraturan yang dibuat oleh pengelola usaha ?
- 2) Adakah factor yang membuat pengunjung kurang nyaman dalam mematuhi aturan yang dibuat oleh pengelola usaha ?

### **4. Struktur Birokrasi**

Bagaimana tanggapan pengunjung terhadap peraturan daerah yang ada di objek wisata ini?

## Lampiran II Surat Keterangan Penelitian

1. Surat izin penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area



# UNIVERSITAS MEDAN AREA

## FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223  
Kampus II : Jalan Seliabudi Nomor 79 / Jalan Sel Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122  
Website: [www.uma.ac.id](http://www.uma.ac.id) E-Mail: [univ\\_medanarea@uma.ac.id](mailto:univ_medanarea@uma.ac.id)

Nomor : 1361 /FIS.2/01.10/XII/2022  
Lamp : -  
Hal : Pengambilan Data/Riset

21 Desember 2022

Yth,  
Bapak/Ibu Kepala Desa Silalahi 1 dan Kepala Desa Silalahi 2  
Di Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan rekomendasi dan kesempatan kepada mahasiswa kami dengan data sebagai berikut :

Nama : Elma Monita Munthe  
N P M : 198520140  
Program Studi : Administrasi Publik

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/riset di **Desa Silalahi 1 dan Desa Silalahi 2**, dengan judul Skripsi *"Implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Dalam Pengelolaan Objek Wisata Tao Silalahi Di Desa Silalahi Kabupaten Dairi"*

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian dimaksud adalah semata-mata untuk tulisan ilmiah dan penyusunan skripsi, ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa tersebut untuk mengikuti ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

Selanjutnya kami mohon kiranya dapat memberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan dan surat keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data pada Instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin

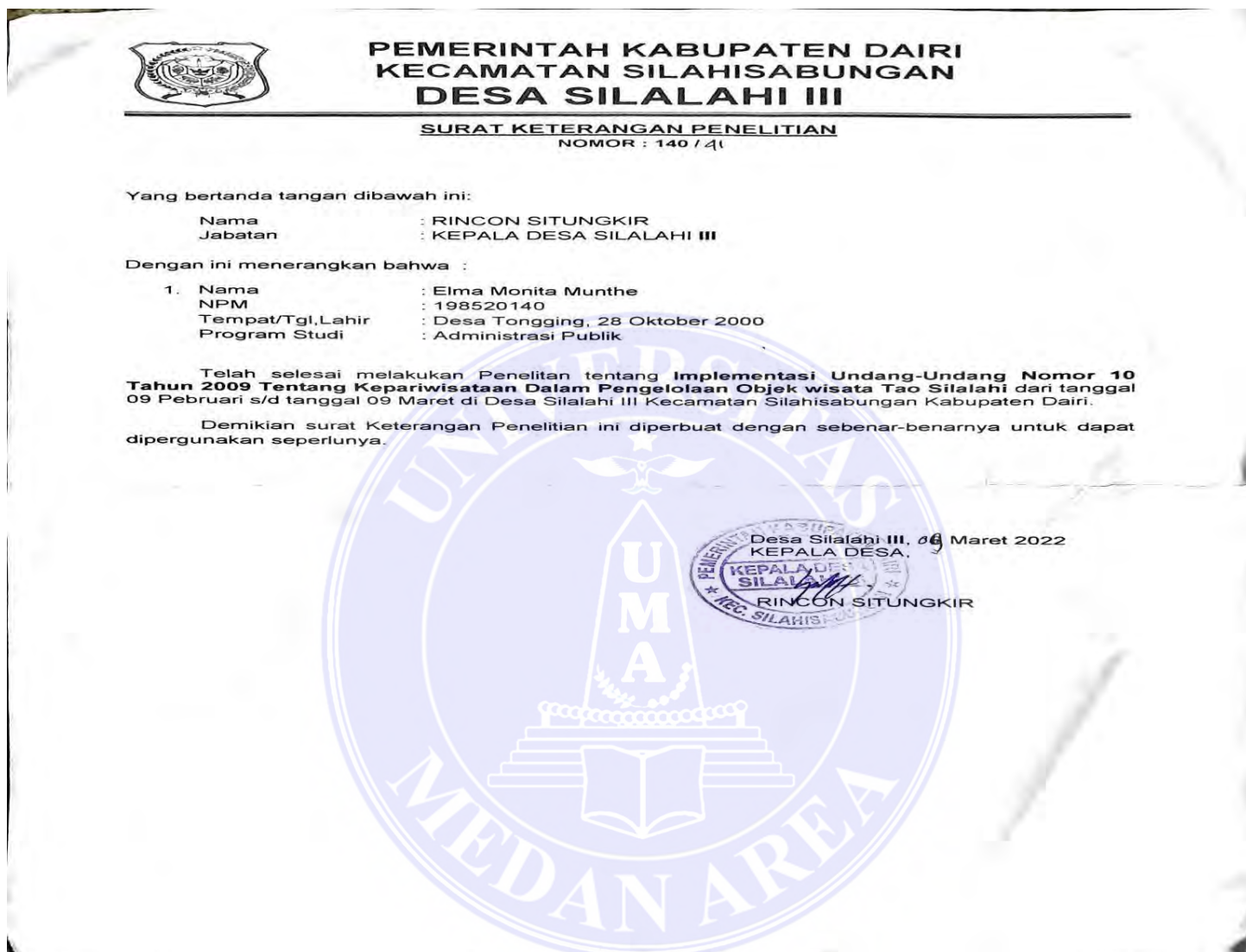
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,  
  
Dr. Effiaty Juliana Hasibuan, M.Si

CC : File,-



2. Surat Keterangan pelaksanaan penelitian dari kantor kepala desa Silalahi III, Kecamatan Silalahisabungan, Kabupaten Dairi;





### Lampiran III Hasil Dokumentasi



**Gambar 5.1 Akses Jalan Menuju Tao Silalahi**  
(Sumber: Dokumen pribadi 2023)



**Gambar 5.2 Dokumentasi Wawancara Bersama Perangkat Desa**  
(Sumber: Dokumen pribadi 2023)



**Gambar 5.3 Wawancara bersama perangkat Desa**  
(Sumber: Dokumen pribadi 2023)



**Gambar 5.4 Dokumentasi Pengelola Usaha Objek Wisata Tao Silalahi**  
(Sumber: Dokumen pribadi 2023)



**Gambar 5.5 Dokumentasi bersama pengelola usaha**  
(Sumber: Dokumen pribadi 2023)



**Gambar 5.6 Dokumentasi bersama Pengunjung**  
(Sumber: Dokumen pribadi 2023)



**Gambar 5.7 Dokumentasi bersama pengunjung**  
(Sumber: Dokumen pribadi 2023)



**Gambar 5.8 Dokumentasi bersama Masyarakat**  
(Sumber: Dokumen pribadi 2023)